

Ibu Habibah MP UNM

National Seminar and  
International Conference

Volume I Nomor 01 Sept 2015

ISSN : 772460 - 756001

Buku III

# PROCEEDING

SCIENTIFIC FORUM-FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF  
SCIENCE EDUCATION (FIP-JIP)



9<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> SEPTEMBER 2015

FACULTY OF EDUCATION, CORONTALO STATE UNIVERSITY  
CORONTALO



<b>Inovasi Pengawasan Pendidikan (Suatu Tinjauan Pendidikan di Daerah (3T) Terdepan, Terluar dan Tertinggal)</b> <b>Sitti Habibah</b>	314
<b>Pengaruh Promosi Kesehatan dengan Metode <i>Edutainment</i> Terhadap Perubahan Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang HIV/AIDS</b> Sri Manovita Pateda, Brata Nurhaji Sugeha	326
<b>Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Daya Tarik Belajar</b> Sudiyono	334
<b>Pengaruh Kemampuan Awal Siswa, Kecerdasan Logis Matematik, dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP Negeri Se-Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato</b> Sumardin Van Gobel	346
<b>Pembelajaran Menulis Ilmiah yang Partisipatif dan Kolaboratif untuk Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosional Mahasiswa</b> Supriyadi	356
<b>Budaya Organisasi Sekolah Menengah Negeri di Kota-Kota dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat</b> Syahril	364
<b>Peranan Koperasi Terhadap Perkembangan Wilayah</b> Usman Moonti	372
<b>Audit Mutu Internal Sebagai Penjaminan Mutu di Sekolah</b> Wahyu Sri Ambar Arum	384
<b>Mengonstruksi Karakter Positif dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar</b> Wahyu Sukartiningih	399
<b>Upaya Profesionalisasi TAS Melalui Standardisasi Tata Naskah Dinas Di Sekolah</b> Widan Zulkarnain	410
<b>Implementasi Model "ABITA" (Aku Bangga Indonesia Tanah Airku) Dalam Praktik Pendidikan Karakter di Sekolah</b> Tutuk Ningsih	418
<b>Memacu Motivasi Berprestasi Siswa Melalui Model Pembelajaran Focused Classroom Meeting (MP-FCM)</b> Edy Purwanto	427
<b>Strategi Pengembangan Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kab. Bone Bolango</b> Salma A Bouwtha, Rifki Usulu, Iswanto Majidu	439
<b>Pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD) dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Bone Bolango</b> Fitri Hadi Yulia Akib, Frahmawati Bumulo	452
<b>Engineering Of Appropriate Technology Learning to Empower Remote Society In Utilizing Renewable Energy Resources</b> Lukman A. R. Laliyo, Citra Panigoro dan Elya Nusantara	464



## INOVASI PENGAWASAN PENDIDIKAN

(Suatu Tinjauan Pendidikan di Daerah (3T) Terdepan, Terluar dan Tertinggal)

Sitti Habibah

Universitas Negeri Makassar

[habibah.jhr@gmail.com](mailto:habibah.jhr@gmail.com)

### Abstract

*National supervision, is a strategic element in achieving educational goals. Either the supervision of education in a national context, institutional, or curricular goals. However, the supervision of education issues, especially in the area of 3T is the low educational supervision is not only caused by the low quality of the supervisor but also due to the difficult surveillance zone must be passed by the supervisor to get to the target schools. Innovation in the form of advanced technology can not be applied in dealing with various supervision in the area of supervision of 3T area because device support is not yet available. Therefore, the exact form of innovation is done in the area 3T can only be overcome with the innovation of coaching, re-order regulating supervisory system of education and so forth.*

*Keywords: innovation, supervision of education, 3T area.*

### PENDAHULUAN

Negera Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi daerah yang bervariasi, dengan karakteristik keberagaman adalah bagian dari kekayaannya termasuk masalah-masalah yang meyertainya. Perubahan-perubahan yang begitu cepat berbuah kemajuan yang merata di Nusantara ini. Pada umumnya hanya daerah perkotaan yang semakin modern sementara daerah pelosok semakin tertinggal. Jika persoalan ini didiskusikan pada ranah pendidikan maka tentunya hal ini menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera, sebab bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya telah berkomitmen untuk menyejahterakan warganya secara utuh, adil dan merata.

Besar dan kompleksnya permasalahan pendidikan kita sekarang, utamanya dalam menghadapi masa depan yang tidak menentu serta mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam memberikan kesejahteraan yang adil dan merata mensyaratkan sikap inovatif dan seluruh komponen bangsa untuk dapat berpikir lebih maju arif dan bijaksana. Maka meregulasi ulang tatanan sistem pendidikan agar kiranya upaya pencapaian tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang sebaiknya dilakukan.

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan, utamanya di daerah 3T salah satunya adalah rendahnya pengawasan pendidikan yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya mutu pengawasan tetapi juga disebabkan oleh sulitnya medan/zona pengawasan yang harus dilalui pengawasan untuk sampai ke sekolah-sekolah binaan. Akibatnya produktifitas pengawasan pendidikan terutama dalam upaya pembinaan yang lebih jauh, yang ada hanyalah sebatas pengumpulan informasi atau “cek & ricek” atas berjalan tidaknya aktivitas belajar



mengajar secara konvensional. Jika hal ini terus berlanjut maka dapat dipastikan bahwa progresivitas pendidikan di daerah 3T hanya akan berjalan lambat bahkan boleh jadi tidak ada perkembangan sehingga daerah-daerah yang telah dikategorikan tertinggal akan semakin tertinggal.

Permasalahan lain terkait dengan pengawas ialah ketidakjelasan posisi pengawas dimana sebagian berada di bawah propinsi sebagian lagi berada di bawah kabupaten/kota sehingga karier mereka semakin tidak jelas. Rendahnya kualitas pengawas memang harus diakui, karena di sejumlah daerah jabatan pengawas adalah jabatan buangan bagi para pejabat yang tidak disukai oleh kepala daerah. Akibatnya wibawa pengawas pun runtuh. Hal inilah yang menyebabkan sehingga profesi pengawas tidak begitu bergengsi atau diminati oleh guru dan kepala sekolah, belum lagi kualifikasi dan kompetensi mereka yang rendah dan meragukan karena perekrutannya syarat akan kepentingan politik.

Terkait dengan pengawas yang kurang profesional oleh Arikunto (2014) memberikan salah satu contoh kasus yang ditemuinya di salah satu kantor pengawas yakni adanya tumpukan laporan pengawas yang ditulis setelah melakukan tugas supervisi ke sekolah terus bertambah tinggi yang ternyata tidak ada *follow up*. Lebih lanjut menurut Arikunto jika hal ini terus berlanjut maka dimungkinkan sekali bagi guru-guru yang semula kreatif dan mau melaksanakan saran pengawas, berubah menjadi apatis dan tidak mau melakukan lagi. Fenomena tersebut ada dan mungkin banyak, tetapi tampaknya selama ini belum ada pihak yang memperhatikan (Arikunto, 2014).

Pertanyaan kemudian ialah bagaimana pendidikan persekolahan pada khususnya di daerah 3T dapat dikelola secara efektif, efisien, sebagaimana yang telah direncanakan serta dirumuskan dalam standar nasional pendidikan. Salah satu usaha yang dinilai tepat untuk dapat mendongkrak kualitas pendidikan di daerah 3T ialah pertama, dengan mengembalikan aktifitas pengawasan pendidikan ketitahnya, kedua, dengan menginovasi aktifitas pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan, adalah elemen strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan. Baik tujuan pendidikan dalam konteks nasional, institusional, dan juga tujuan kurikuler.

## PEMBAHASAN

Dalam rangka otonomi sekolah, kepala sekolah memiliki kewenangan yang besar dalam membuat kebijakan tingkat sekolah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab pendidikan pada tingkat sekolah, kini memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengembangkan program, mengelola dan mengawasinya, memiliki keleluasaan dalam mengatur segenap sumber daya yang dimilikinya untuk dimanfaatkan agar tercipta produktivitas dan mutu sekolah (Sutarsih & Nurdin, 2014).

Problem yang dihadapi oleh kepala sekolah maupun pengawas sangat kompleks. Perlunya kepemimpinan yang mantap dan konsisten dewasa ini sangat terasa karena kepala sekolah maupun pengawas selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan. Baik dari pemerintah berupa intruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, dari organisasi guru berupa saran perbaikan, dari kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa atau mungkin juga dari berbagai yayasan pendidikan (Sa'ud, 2012).



Pada umumnya seluruh komponen bangsa mendambakan pendidikan yang lebih baik, sementara berbagai kemajuan oleh perubahan yang begitu cepat justru menciptakan ketimpangan yang begitu serius antara daerah perkotaan dengan pelosok desa, sehingga dengan demikian pendidikan di daerah pelosok dirasakan semakin tertinggal. Untuk itu menurut Hasbullah (2013:201) "Tugas pembaruan pendidikan yang utama adalah memecahkan persoalan tersebut, baik dengan cara konvensional maupun dengan cara yang inovatif". Lebih lanjut Hasbullah (2013:201) menekankan bahwa "Titik pangkal pembaruan pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual, yang secara sistematis akan dipecahkan dengan cara inovatif".

Menurut *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, inovasi/innovation berarti "new idea, method, etc", dalam bentuk kata kerjanya *to innovate* berarti "make changes, introduce new things", sementara itu dalam *the American Heritage Dictionary* inovasi diartikan "the act of introducing something new: something newly introduced". Dalam konteks organisasi dan manajemen, penerapan hal baru dalam berbagai bentuknya akan berimplikasi pada perubahan dalam bentuk ide, praktik, ataupun objek/benda tertentu yang dianggap baru oleh seseorang atau oleh kesatuan/kolompok yang mengadopsi. Dengan demikian, inovasi tidak harus sesuatu yang benar-benar baru secara objektif, namun pandangan subjek yang menganggap sesuatu itu baru merupakan ide dasar dari konsep inovasi. Inovasi merupakan suatu perwujudan dari ide kreatif dalam upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di masa depan, dan hal itu akan mendorong pada perubahan kinerja dalam dimensinya yang baru (Sugengputra, 2013).

Motivasi yang mendorong perlunya inovasi pendidikan jika dilacak biasanya berakar pada dua hal yaitu: (1) kemauan sekolah dalam merespon tantangan kebutuhan masyarakat, dan (2) adanya usaha untuk menggunakan sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Agar kita dapat lebih memahami tentang perlunya perubahan pendidikan atau kebutuhan adanya inovasi pendidikan dapat kita gali dari tiga hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan di sekolah, yaitu (1) kegiatan belajar mengajar, (2) faktor internal dan eksternal, dan (3) sistem pendidikan (pengelolaan dan pengawasan) (Sugengputra, 2012).

### **Agensi Pengawasan Pendidikan**

Pengawas pendidikan berdasarkan Permendiknas No 12 Tahun 2007 adalah guru yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan pembinaan dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan menengah, sekolah dasar dan sekolah menengah. Menurut PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga menegaskan kriteria pengawas satuan pendidikan harus berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, serta telah lulus seleksi pengawas satuan pendidikan (Fathurrohman & Suryana,



Pengawas pendidikan dalam konteks perubahan pendidikan adalah elemen yang dapat memberikan pencerahan. Pencerahan itu bersifat komprehensif di lingkungan persekolahan. Meskipun kinerja pengawas bersifat teknis namun tetap memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pencapaian kinerja setiap personil sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, peserta didik dan siapa saja yang terlibat secara langsung terhadap proses pembelajaran (Siahaan, Rambe, & Mahidin, 2006)

Pengawas satuan pendidikan/sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerlukan kemampuan-kemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai pengawas profesional. Oleh sebab itu kompetensi pengawas sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Tanpa memiliki kompetensi profesional dalam hal kepengawasan, para pengawas akan sulit meningkatkan kinerjanya sehingga langsung maupun tidak langsung tidak akan berdampak terhadap mutu dan produktivitas sekolah atau satuan pendidikan yang dibinanya (Aedi, 2014).

Ada sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimiliki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina. Wawasan pengawas sekolah dalam bidang penilaian sangatlah dibutuhkan. Mulai dari memahami konsep penilaian, jenis penilaian, indikator penilaian, instrumen penilaian, mengolah hasil penilaian, sampai kepada memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas sekolah. Selain itu, melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari kompetensi yang tidak boleh dilupakan. Sehubungan dengan ini, ada empat kelompok tugas pengawas sekolah yaitu: (1) merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya; (2) melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian; (3) mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah; dan (4) memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan (Ismail, 2014).

Prosedur pengawasan meliputi penentuan standar, mengadakan pengukuran, mengadakan perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar, dan melakukan perbaikan manakala ada penyimpangan. Sasaran pengawasan meliputi keseluruhan substansi manajemen tingkat satuan pendidikan (sekolah pada setiap jenjangnya), yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen kesiswaan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen partisipasi masyarakat, manajemen ketatausahaan, dan manajemen layanan khusus (Imron, 2013).

Pada dasarnya terdapat empat tujuan pengawasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kaho yaitu untuk: (1) mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, (2) mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh praktisi di sekolah untuk kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan, (3) membantu tugas pelaksana dalam melakukan evaluasi diri atau pembenahan atas kekeliruan-kekeliruan yang tidak disadarinya, (4) untuk melakukan perbaikan bukan sekedar menyalahkan (Aedi, 2014).

Selain itu pengawasan memiliki empat fungsi yakni (1) Informatif-progresif yakni fungsi pengaturan informasi untuk progres akan kemajuan, (2) Pengecekan-Preventif yakni fungsi pencegahan dengan melakukan pengecekan untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan



yang mengarah pada penyimpangan, (3) korektif yakni fungsi perbaikan secara berkelanjutan dengan cara mengarahkan, melayani dan melakukan pembinaan (Aedi, 2014).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan pendidikan. Faktor-faktor tersebut menurut Imron (2013) ialah sebagai berikut:

Waktu yang dipergunakan untuk kegiatan pengawasan. Semakin banyak waktu yang disediakan oleh pengawas untuk melakukan pengawasan, maka akan semakin jelas gambaran terhadap hal-hal yang diawasi. Sebaliknya, semakin sedikit waktu yang dipergunakan untuk memberikan pengawasan, maka semakin kabur lah gambaran mengenai hal-hal yang diawasi, dan sekaligus semakin tidak efektif.

Kapasitas mental dan daya suai pribadi pengawas, ini juga menuntut pengawasan beserta hasilnya. Makin baik kapasitas mental dan daya suai pengawas terhadap hal-hal yang diawasi, maka semakin efektif pengawasan. Dengan demikian, keefektifan pengawasan juga dipengaruhi dan atau ditentukan oleh pribadi pengawas sendiri.

Kompleksitas hal-hal yang diawasi, semakin kompleks hal-hal yang diawasi, semakin banyak energi yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk melakukan pengawasan dan sebaliknya, kompleksitas sesuatu yang diawasi juga menjadi penyebab makin kaburnya hal-hal yang diawasi. Sebaliknya, makin sederhana atau sedikit segala sesuatu yang diawasi, akan semakin jelaslah hal-hal yang diawasi. Jadi semakin efektiflah pengawasan tersebut.

Tugas-tugas lain dari eksekutif. Jika tanggung jawab manajer di luar tugas-tugas pengawasan dan manajerial rangkap, maka keefektifan pengawasan akan berkurang.

Stabilitas operasi. Semakin stabil operasi pengawasan yang dilakukan oleh manajer, maka gambaran terhadap sesuatu yang diawasi akan semakin detail. Pengendalian terhadap penyimpangan performansi akan bisa lebih maksimal. Sebaliknya, jika operasi yang dilakukan semakin tidak stabil, maka pengendalian-pengendalian yang semestinya dilakukan bisa terbengkalai.

Kemampuan dan pengalaman bawahan. Tidak ada faktor yang mendukung kesuksesan pengawasan dibandingkan faktor pengalaman dan kemampuan bawahan. Ini termasuk salah satu aset yang berharga jika dikaitkan dengan penyelesaian pekerjaan. Bawahan dengan kemampuan yang tinggi dan dengan pengalaman yang banyak, akan mudah sekali diawasi, dan bahkan sedikit sekali membutuhkan pengawasan dibandingkan dengan bawahan yang tidak mampu dan tidak berpengalaman. Olehnya itu, kemampuan dan pengalaman bawahan juga turut mempengaruhi keefektifan pengawasan.

### **Faktor Penghambat Pengawasan Pendidikan di daerah 3T**

Berdasarkan NUPTK Februari 2009 jumlah kepala sekolah 195.633 sedangkan pengawas 23.050 berarti rata-rata pengawas harus membina 8 sekolah (Fathurrohman & Aedi, 2011). Bahkan menurut Aedi (2014) beban kerja pengawas tergolong tinggi dimana mereka membina sedikitnya 10 sampai 12 unit wilayah kerja. Selanjutnya, menurut Muhammad Hatta pelaksanaan uji kompetensi kepala sekolah dan pengawas yang diinisiasikan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di seluruh provinsi pertengahan 2015 lalu, diikuti 208.000 kepala sekolah dan 23.000 orang pengawas (Nasir, 2015). Dengan menggunakan data uji kompetensi tersebut maka rata-rata pengawas harus membina 9



sekolah. Berkutut pada rasio yang tidak ideal tersebut pengawas terutama untuk daerah 3T harus berhadapan dengan sulitnya medan untuk sampai ke sekolah-sekolah binaan.

Selain itu, masalah-masalah teknis pembelajaran yang ada pada sekolah-sekolah binaan seringkali tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pengawas, disebabkan karena pemahaman pengawas terhadap masalah-masalah yang dihadapi juga masih sangat rendah. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diperuntukan bagi pengawas sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengawas menyelesaikan masalah-masalah teknis pembelajaran yang dihadapi di setiap sekolah binaan. Pengawas juga kurang mendapat informasi tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan (Ismail, 2014).

Selanjutnya, adanya keterbatasan kewenangan dan kemampuan profesional, menurut Florio dalam Sa'ud (2012) dapat menyebabkan timbulnya ketidakmampuan untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadapi tantangan kemajuan jaman. Rasa ketidakmampuan menimbulkan frustrasi dan bersikap apatis terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Sikap apatis dan rasa frustrasi mengurangi rasa tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan tugas. Dampak dari sikap apatis, kurang semangat berpartisipasi dan kurang rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, menyebabkan tampak dari luar sebagai guru dan pengawas yang tidak profesional. Dengan adanya tanda-tanda bahwa pengawas kurang mampu melaksanakan tugas maka akan mengurangi kepercayaan guru terhadap pengawas dan sebaliknya.

Selain itu beberapa faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan oleh Imron (2013) secara singkat dikemukakan sebagai berikut; (1) Perasaan sungkan yang berlebihan, (2) Tugas-tugas ketatausahaan yang menyibukkan bagi kepala sekolah sehingga tugas pengawasannya terabaikan, (3) Rasa takut bawahan terhadap sosok pengawas membuat bawahan merekayasa kondisi yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang ada, (4) Pengawas tidak menguasai substansi yang diawasi, (5) Pengawas berperilaku penyimpang seperti skandal/penyelewengan/ pemborosan, (6) Sistematis budaya setempat yang tidak mendukung kegiatan pengawasan seperti solidaritas yang terlalu tinggi, terlalu cepat iba, kurang terbuka, mudah tersinggung dll.

Selanjutnya, di era desentralisasi pengawasan pendidikan menjadi sebuah pengerdilan sistem yakni *recruitment*, penempatan serta jenjang karier yang kurang membahagiakan bagi guru, seolah-olah sebagai tempat pelarian untuk memperpanjang masa usia kerja dan lari dari pensiun (Aedi, 2014). Sistem seleksi yang tidak terbuka dan penuh kolusi dan nepotisme kepartaian membuat profesi pengawas semakin tenggelam (Fathurrohman & Suryana, 2011). Hal tersebut tentu sangat tidak membahagiakan, ditambah lagi berbagai kendala, seperti sistem remunerasi yang tidak kunjung memadai, tuntutan pekerjaan yang tinggi serta berbagai tekanan yang menyudutkan kinerja pengawas sebagai ujung tombak keberhasilan sistem pengawasan pendidikan. Semestinya pengawas dipacu dan dipicu untuk senantiasa terus mengembangkan jati dirinya guna meningkatkan profesionalisme pendidik sesuai dengan tugas dan perannya (Aedi, 2014).

### **Inovasi Pengawasan Pendidikan di Daerah 3T**

Berbagai masalah pengawasan pendidikan di daerah 3T hanya dapat diatasi dengan melakukan inovasi. Inovasi tersebut bisa berupa pembinaan, meregulasi ulang tatanan sistem



pengawasan pendidikan dan lain sebagainya. Mengingat bahwa penyelenggaraan pendidikan bersifat formal yang dikelola dalam suatu bentuk organisasi yang memiliki karakteristik tersendiri, maka diperlukan suatu pola inovasi yang sesuai dengan karakteristik pendidikan setempat, maka diperlukan strategi yang dapat dilakukan berdasarkan keragaman yang ada dalam bidang pendidikan.

Perkembangan pemanfaatan/penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang semakin meluas terutama di negara-negara maju, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media ini memang sangat dimungkinkan diselenggarakannya proses pembelajaran dengan monitoring yang lebih efektif. Hal itu terjadi karena dengan sifat dan karakteristik internet yang cukup khas, sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai media sebagaimana media lain telah dipergunakan sebelumnya seperti radio, televisi, telepon genggam, smart phone dengan jaringan 3G dan lainnya (Sa'ud, 2012).

Persoalan kemudian ialah bagaimana dengan daerah 3T yang tidak terjangkau oleh jaringan internet dan telekomunikasi?. Tentu inovasi dalam bentuk ini belum bisa diterapkan mengingat dukungan perangkat belum tersedia di daerah 3T belum lagi pengadaannya membutuhkan biaya yang amat sangat besar yang jika dipaksakan akan berdampak pada tidak efektifnya inovasi yang dapat berlangsung lama melampaui beberapa generasi sehingga pada hal ini, bentuk inovasi yang dapat dilakukan di daerah 3T sebaiknya ditempuh dengan cara lain yang bisa berupa pembinaan, meregulasi ulang tatanan sistem kepengawasan pendidikan dan lain sebagainya yang tentunya dengan pola inovasi yang cocok diterapkan di daerah 3T.

Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional pengawas adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan setempat. Pembinaan pengawas satuan pendidikan mencakup pembinaan profesi dan pembinaan karier. Pembinaan profesi diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Sedangkan pembinaan karier pengawas diarahkan untuk meningkatkan pangkat dan jabatan fungsionalnya sesuai ketentuan yang berlaku (Aedi, 2014).

Tujuan umum pembinaan dan pengembangan karier pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah meningkatnya kemampuan karier pengawas sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan/ sekolah yang profesional. Secara khusus tujuan pembinaan tersebut dirumuskan oleh Aedi (2014) sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang dibinanya.

2. Meningkatkan kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sehingga dapat mempertinggi kinerjanya.

3. Mampu bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, staf sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan/ sekolah binaan.

4. Mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.



5. Berjalannya jenjang karier jabatan pengawas melalui angka jabatan fungsionalnya.

Agar pengawas maupun kepala sekolah dapat melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan, perlu digunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Berdasarkan pengalaman para pelaksana "*Model School Project*" di Amerika Serikat, disarankan digunakannya "*Team Manajemen Pengawasan*" (*Supervisory-Management = S-M Team*). Ada dua Elemen dasar dalam team S-M untuk meningkatkan efektifitas kepemimpinan sekolah. *Pertama* peranan kepemimpinan harus diseberluaskan melalui perluasan konsep team manajemen-pengawasan. *Kedua* team S-M harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personal di sekolah maupun dengan warga masyarakat. Untuk sekolah yang kecil atau struktur organisasinya tanpa ada bagian-bagian, maka semua guru atau personel sekolah diikut sertakan dalam pembuatan perencanaan, pembuatan keputusan serta menilai perkembangan dan bagian dari program pendidikan. Pada sekolah yang besar pejabat bagian pendidikan (*educational department*) bekerja sama dengan team S-M, untuk menunjukkan minat guru serta memperhatikan fungsi manajemen-pengawasan pada semua sekolah. Kegiatan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, dilakukan oleh semua personalia sekolah, sesuai dengan bidang garapannya masing-masing (Sa'ud, 2012).

Lebih lanjut (Aedi, 2014:145) mengemukakan bahwa keberhasilan pembinaan dan pengembangan karier pengawas satuan pendidikan/sekolah harus terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut:

- Meningkatnya kualifikasi pengawas minimal berpendidikan (S1).
- Meningkatnya motivasi kerja para pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai profesional.
- Meningkatnya kinerja dan hasil kerja pengawas yang ditunjukkan oleh kemajuan-kemajuan mutu pendidikan pada sekolah binaannya.
- Meningkatnya pangkat dan jabatan pengawas setelah memenuhi angka kredit dan jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kesejahteraan materil dan non materil sesuai dengan jabatan dan prestasi yang dicapainya.
- Meningkatnya citra positif para pengawas satuan pendidikan di kalangan *stakeholder* sekolah.

Pembinaan kemampuan profesional pengawas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas baik kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi maupun kompetensi profesional. Pembinaan diberikan kepada para pengawas untuk semua kategori yakni pengawas pratama, pengawas muda, pengawas madya dan pengawas utama. Adapun pembinaan yang diberikan antara lain sebagai berikut; (1) program pendampingan tugas pokok dan fungsi pengawas, (2) diskusi terprogram, (3) forum ilmiah, (4) monitoring dan evaluasi, (5) partisipasi dalam kegiatan ilmiah, (6) studi banding, (7) rapat koordinasi (rakor) pengawas (Aedi, 2014). Dari sekian banyak jenis pembinaan yang dikemukakan di atas maka inovasi dalam hal pembinaan pengawas yang sesuai diterapkan di daerah 3T di bahas satu persatu sebagai berikut:

Program pendampingan tugas pokok dan fungsi pengawas ditujukan bagi pengawas pratama dan/atau pengawas muda kurang dari tiga tahun. Pendampingan dilaksanakan oleh



nya.  
vasi dengan  
an sistem  
del School  
pengawasani  
S-M untuk  
binan haru  
team S-M  
an segenap  
kecil atau  
nel sekolah  
ta menia  
abat bagian  
enunjukkan  
a sekolah  
oleh semua  
).  
binan dan  
n indikator  
n tanggung  
kemajuan  
dan jabatan  
il dan m  
stakeholder  
eningkatan  
si pedagogi  
ntuk semua  
was utama  
ndampingan  
monitoring  
koordinasi  
mukakan di  
erah 3T di  
i pengawas  
nakan oleh

pengawas utama atau Samapta (Golongan IV/d atau IV/e). Pendampingan pengawas dilaksanakan dengan melaksanakan tugas kepengawasan minimal satu semester di satuan pendidikan/sekolah binaannya dengan zona/wilayah yang tidak begitu terpisah jauh. Program pendampingan ini mirip dengan program magang yang selama ini dilaksanakan. Pendampingan dapat melalui SK Kepala Dinas Pendidikan (Aedi, 2014).

Diskusi terprogram antarpengawas dilakukan secara berkala minimal dua kali setiap semester. Diskusi dikoordinir oleh Korwas yang dilaksanakan di kantor pusat daerah kabupaten/Kota. Materi yang dibahas berkisar pada; (a) peningkatan kompetensi pengawas, (b) tugas pokok dan fungsi, (c) kinerja dan hasil kerja pengawas, (d) penyusunan program kerja pengawas, (e) pelaporan hasil kerja, (f) inovasi pendidikan dan pembelajaran/bimbingan, (g) sistem evaluasi, (h) pengembangan kurikulum, (i) manajemen sekolah, (j) administrasi sekolah, dan (k) kegiatan akademik lainnya yang sesuai kebutuhan. Fasilitas yang diberikan meliputi: (a) dana, (b) alat tulis (c) fasilitas kerja, (d) sumber daya lainnya yang diperlukan (Aedi, 2014).

Upaya lain yang dapat dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dalam membina dan mengembangkan kemampuan profesional pengawas dapat dilakukan dengan memfasilitasi pengawas untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar, lokakarya, diskusi panel, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya baik yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, Pemda, Organisasi Profesi, termasuk yang diperuntukkan bagi guru dan kepala sekolah agar pengawas tidak ketinggalan dengan inovasi-inovasi pendidikan yang sedang berlangsung (Aedi, 2014).

Selanjutnya bentuk pembinaan bagi pengawas yang bertugas di daerah 3T dapat dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) pengawas yang dilaksanakan tiap awal tahun baru di setiap daerah kabupaten/kota. Kegiatan Rakor pengawas adalah: (a) mengevaluasi ketercapaian program kerja tahun sebelumnya, (b) menganalisis kendala-kendala dan temuan, (c) menyusun program kerja dan anggaran satu tahun yang akan datang berdasarkan hasil analisis/evaluasi tersebut, (d) menyusun dan membuat instrumen supervisi yang baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang baru dengan berdasar pada hasil revisi instrumen yang lama, (e) sosialisasi kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pendidikan, (f) menyiapkan makalah dari Korwas atau pengawas senior yang ditunjuk, (g) koordinasi lintas daerah serta pembagian tugas kepengawasan pada sekolah masing-masing, (h) pemetaan pengawas yang baru dan yang akan memasuki usia pensiun, (i) membahas mengenai penetapan kandidat pengawas berprestasi untuk memperoleh penghargaan, (j) menyusun standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur operasional (SPO) kepengawasan, (k) analisis kebutuhan pengawas satuan pendidikan, termasuk pergantian waktu Korwas (Aedi, 2014).

#### **Proses Inovasi Pendidikan**

Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai dari sekedar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi di bidang pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain



tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir (Sa'ud, 2012).

Menurut Roger dalam Sa'ud (2012:36) bahwa proses keputusan inovasi terdiri dari lima tahap, yaitu (1) tahap pengetahuan, (2) tahap bujukan, (3) tahap keputusan, (4) tahap implementasi, dan (5) tahap konfirmasi. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi (Sa'ud, 2012). Tahap ini penting bagi aktor perubahan sebab dalam bidang pendidikan menyadari akan pentingnya perubahan adalah tugas pengawas yang juga berfungsi sebagai pembaharu yang senantiasa diharapkan dapat menjadi motor perubahan tingkah mengajar guru di sekolah. Apabila para pengawas mampu menunjukkan sesuatu yang baru bagi guru maka dapat dipastikan kehadiran para pengawas akan selalu dirindukan oleh guru yang progresif.

Selanjutnya pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap inovasi. Pada tahap ini, yang berperan utama dalam diri adalah ranah afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangkan inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Dalam tahap persuasi ini dibutuhkan kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran berdasarkan kondisi dan situasi. Untuk memudahkan proses tersebut maka dibutuhkan gambaran yang jelas tentang bagaimana konsekuensi dari pelaksanaan inovasi tersebut (Sa'ud, 2012). Dalam tahap ini pengawas diharapkan dapat menerima inovasi lalu kemudian bertindak sebagai pembaharu dengan memproyeksikan penerapan inovasi ke guru-guru sesuai kondisi dan situasi setiap sekolah.

Tahap selanjutnya ialah tahap keputusan dari proses inovasi, tahap ini berlangsung jika seseorang menetapkan sikap menerima atau menolak inovasi. Seringkali seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu atau dengan melihat hasil dari orang lain. Perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataannya seringkali inovasi yang digagas mendapat penolakan sejak awal tahap pengetahuan. Dalam pelaksanaan difusi inovasi antara pengetahuan, persuasi dan keputusan inovasi sering berjalan bersamaan (Sa'ud, 2012). Dengan demikian untuk dapat mengurangi tingkat resistensi akan inovasi yang digagas maka diharapkan pengawas sebagai aktor perubahan memiliki strategi dan kemampuan komunikasi yang aplikatif dalam melaksanakan tugas kepengawasannya.

Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun fisik. Keputusan menerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik (Sa'ud, 2012). Dalam tahap ini seorang pengawas dianggap telah mengimplementasikan keputusan inovasi apabila pengawas telah menerapkan inovasi. Begitu pula guru dianggap telah mengimplementasikan keputusan inovasi apabila guru telah menerapkan inovasi.

Dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya yang pada dasarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas.



terjadinya perubahan tingkah laku seseorang antara lain disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan internal. Seseorang yang merasa terdapat sesuatu yang tidak sesuai atau tidak nyaman yang disebut *disonasi*. Untuk menghindari *droup out* dalam penerimaan dan implementasi inovasi (*discontinuity*) peran agen pembaharu sangat dominan. Tanpa ada mentoring dan penguatan orang akan mudah terpengaruh pada informasi negatif tentang inovasi yang sedang digagas (Sa'ud, 2012). Dalam tahap ini peran pengawas sebagai agen pembaharu begitu dominan untuk menghindarkan guru dari sikap pesimis dalam mengimplementasikan suatu inovasi.

## SIMPULAN

Persoalan pengawasan di daerah 3T tidak hanya disebabkan oleh rendahnya mutu pengawas tetapi juga disebabkan oleh sulitnya medan/zona pengawasan yang harus dilalui oleh pengawas untuk sampai ke sekolah-sekolah binaan. Salah satu usaha yang dinilai tepat untuk dapat mendongkrak kualitas pendidikan di daerah 3T ialah pertama, dengan mengembalikan aktifitas pengawasan pendidikan ketitahnya, kedua, dengan menginovasi kualitas pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan, adalah elemen strategis dalam mencapai tujuan pendidikan.

Pengawas satuan pendidikan/sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerlukan kemampuan-kemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai pengawas profesional. Oleh sebab itu kompetensi pengawas sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Mengingat inovasi dalam bentuk teknologi canggih belum bisa diterapkan oleh karena dukungan perangkat belum tersedia di daerah 3T maka inovasi yang tepat dilakukan di daerah 3T adalah melalui kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut; (1) program pendampingan tugas pokok dan fungsi pengawas, (2) diskusi terprogram, (3) forum ilmiah, (4) partisipasi dalam kegiatan ilmiah, (5) rapat koordinasi (Rakor) pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, N. (2014). *Pengawasan Pendidikan; Tinjauan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Triwiyanto, S. (2014). *Pengawas Sekolah-Perlu Dibina, Oleh Siapa dan Bagaimana?* (8-9 Desember 2014 ed.). (T. Triwiyanto, & D. E. Kusumaningrum, Penyunt.) Malang: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. AP FIP UM.
- Wahidman, P., & Suryana, A. (2011). *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pembelajaran*. (S. A. Mifka, Penyunt.) Bandung: Refika Aditama.
- Wahidman, (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahidman, A. (2013). *Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Wahidman, B. (2014). *Supervisi Akademik Pengawas Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembelajaran pada Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal(3T) (Studi Kasus pada UPTD Kecamatan Elar dan UPTD Kecamatan Borong di Kabupaten Manggarai Timur, N. Tesis tidak dipublikasikan*. Malang: Program Pascasarjana UM.



- Nasir, M. (2015). *Masyarakat Perlu Tahu Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas*. (Online) dalam : <http://print.kompas.com/baca/2015/03/19/Masyarakat-Perlu-Tahu-Hasil-Uji-Kompetensi-Kepala> diakses 07 Agustus 2015.
- Sa'ud, U. S. (2012). *Inovasi Pendidikan*. (Riduwan, Penyunt.) Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, A., Rambe, A., & Mahidin. (2006). *Manajemen Pengawas Pendidikan*. Ciputat: Jakarta: Quantum Teaching.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Cetakan kedua (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.
- Sutarsih, C., & Nurdin. (2014). *Manajemen Pendidikan: Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia* (Cetakan ke-7 ed.). (Riduwan, Penyunt.) Bandung: Alfabeta.